



Media Title	Koran Tempo	
Date	25 November 2014	Color
Section	News	Circulation
Page No	5	Article Size
Journalist	Mustafa Ismail	Advalue
Frequency	Daily	PR Value

Pemerintah Tolak Revisi Upah Buruh

Buruh mengancam memblokade jalan dan tol.

Mustafa Ismail

mustafa@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah tak akan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2015 sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. "Tidak ada rencana itu," kata Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Maliki, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, penetapan kenaikan UMP sudah disepakati bersama seluruh provinsi sejak awal bulan ini. Dalam kesepakatan itu, serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah telah memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Maka, permintaan adanya revisi setelah kenaikan harga BBM sulit terealisasi.

Penetapan UMP dilakukan hampir serentak pada 1 November lalu. Adapun

upah minimum kabupaten/kota (UMK) ditetapkan paling lambat 21 November. Namun upah itu dituding tidak mengakomodasi kenaikan harga BBM pada 18 November lalu.

Keputusan pemerintah ini ditentang buruh. Di Tangerang, 30 aliansi buruh dan serikat pekerja hari ini akan memblokade Jalan Raya Serang, simpul utama perindustrian di Tangerang, jika upah tidak direvisi. Upah yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.710.000 untuk Kabupaten Tangerang dan Rp 2.730.000 untuk Kota Tangerang.

"Sebanyak 200 ribu buruh akan turun ke jalan. Target kami melumpuhkan jalur perekonomian Tangerang," ujar Koordinator Antar Wilayah Komite Aksi Buruh Tangerang Bergerak, Sunarno, kemarin.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnaen mengaku telah menerima surat permintaan revisi upah dari buruh. "Sedang kami

pertimbangkan," katanya.

Di Semarang, buruh mengancam memblokade jalan tol Gayamsari pada hari ini demi meminta revisi upah. Sekretaris Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang), Nanang Setyono, menyatakan upah yang ditetapkan Gubernur masih jauh dari harapan. "Kami menghitung dampak kenaikan harga BBM bisa sampai 35 persen, tapi penambahan UMK hanya 2 persen," katanya.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Chris Kanter, mengatakan pengusaha sudah mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM terhadap upah buruh. Dia menyebut kenaikan harga BBM selalu diiringi peningkatan tunjangan transportasi. Menurut dia, selain kenaikan harga BBM, pengusaha selalu mempertimbangkan sebab lain, seperti kenaikan inflasi, dalam menaikkan upah.

● JAYADI SUPRIADIN | JONIANSYAH |
ROFIUDDIN | FAIZ NASHRILLAH | AGUSTIN RUDIANA